PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER: STUDI DESA ADAT DI BALI

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

A.A. Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana,

e-mail: ari_atudewi@unud.ac.id

I Ketut Sudantra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ketut_sudantra@unud.ac.id

Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: cok_dahana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p19>

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui peran desa adat di Provinsi Bali dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Penelitian ini juga menganalisis efektivitas terhadap penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber pada tingkatan desa adat di Bali. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosio-legal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Metode sosio-legal digunakan karena dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari pengelolaan sampah berbasis sumber namun juga praktek empirikal di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa desa adat di Bali diberikan tugas dan kewenangan untuk berperan serta melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber pada tingkat desa adat. Berbagai regulasi dalam bentuk peraturan perundang – undangan hingga pedoman MDA telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan peran tersebut, namun efektivitas desa adat dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber tidak dapat digeneralisasi mengingat keberagaman aspek faktor efektivitas hukum antara desa adat.

Kata Kunci: Desa Adat, Pengelolaan Sampah, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

This study was conducted to determine the role of traditional villages in Bali Province in implementing source-based waste management. This study also analyzes the effectiveness of the implementation of source-based waste management at the traditional village level in Bali. The research used a socio-legal research method with a regulatory approach and an analytical approach. The socio-legal research method is used because this study not only examines the normative aspects of source-based waste management but also empirical practices in the community. Based on the results, traditional villages in Bali are given the authority to implement source-based waste management at the traditional village level. Government regulations and MDA guidelines have been established to support the implementation of this role, but the effectiveness of traditional villages in implementing source-based waste management cannot be generalized, considering the diversity of aspects of the effectiveness of legal factors between traditional villages.

Keywords: Traditional Villages, Waste Management, and Environment.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia selama hidup pasti menyisakan residu atau yang dikenal dengan sampah. Pengelolaan sampah merupakan permasalahan nasional yang pengelolanya harus dilakukan secara komprehensif sehingga dapat mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagai pemenuhan atas hak asasi manusia sebagaimana amanat dalam UUD NRI 1945. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah serta pemanfaatan sampah.¹ Mayoritas masyarakat menganggap bahwa sampah merupakan residu yang tidak berguna sehingga dibuang begitu saja. Pada tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan pengurangan sampah sebanyak 30% dan penangan sampah sebanyak 70%.

Data Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menunjukan fakta bahwa volume sampah yang dihasilkan di Bali mencapai 1.046.616,04 juta ton pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut sampah yang berhasil dikelola sebesar 783.205,77-ton sedangkan 263.410,27-ton lainnya tidak terkelola.² Adapun komposisi dari sampah tersebut 60% merupakan sampah organik, 20% sampah plastik, dan sisanya terdiri dari kertas, logam, gelas dan sampah dari Pura.³

Saat ini mayoritas masyarakat masih bertumpu pada pengelolaan sampah dengan pendekatan akhir (*end-of-pipe*) yaitu dengan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dan pembuangan sampah. Mengacu pada Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Sampah), Pasal 12 menyebutkan bahwa "seharusnya setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan." Pengertian berwawasan lingkungan dapat diartikan bahwa setiap orang harus bijak dalam pengelolaan sampahnya tidak hanya menuntut hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik namun mengabaikan kewajibannya dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik bagi setiap orang. Lebih lanjut, pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dalam UU Pengelolaan Sampah disebutkan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan pengelolaan sampah di Bali diatur secara khusus melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut Perda Pengelolaan Sampah) yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut maka setiap orang diwajibkan untuk melakukan pengurangan sampah dan pembatasan timbulan sampah. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perda Pengelolaan Sampah setiap orang diwajibkan

---

¹ Abidin, Indra Sutrisno, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Observasi penanganan dan pengurangan sampah di Universitas Singaperbangsa Karawang." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 872-882.

² Data Pengelolaan Sampah Provinsi Bali, URL:<https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/data-pengelolaan-sampah-per-kabupatenkota-di-provinsi-bali?year=2021> , dikutip pada 30 Desember 2023, Pukul 22.27 WITA

³ Wijaya, I. M. W., & Putra, I. K. A. (2021). Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di Pulau Bali. *Jurnal Ecocentrism*, 1(1), 1-8.

melakukan pengurangan sampah melalui 3R yaitu pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*).

Pada upaya pembatasan timbulan sampah, Pasal 12 Perda Pengelolaan Sampah setiap orang diwajibkan melakukan pembatasan timbulan sampah dengan wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Secara umum, ketentuan pada Perda Pengelolaan Sampah menerapkan prinsip pengelolaan sampah berbasis sumber melalui 3R dan mekanisme daur ulang namun pengaturannya belum diatur dengan cukup jelas. Lebih lanjut pemerintah menetapkan Peraturan Gubernur No.47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber) sebagai penegasan perlunya pengelolaan sampah berbasis pada sumber. Pasal 6 Pergub Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban untuk mengelompokkan sampah yang terdiri dari 5 jenis, yaitu;

1. Sampah yang mudah terurai oleh alam;
2. Sampah yang dapat digunakan kembali;
3. Sampah yang dapat didaur ulang;
4. Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3; dan
5. Sampah residu.

Sampah yang mudah terurai oleh alam, umumnya merupakan sampah organik yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya menduduki peringkat pertama volume sampah di Bali yaitu 60%.⁴ Sampah organik pada rumah tangga masyarakat Bali umumnya berasal dari sampah sisa makanan, sampah kebun/pekarangan dan sampah sisa upakara. Menyikapi hal tersebut pemilahan dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam wajib dilaksanakan. Pasal 6 ayat (4) Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber menyebutkan bahwa pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam dapat dilakukan secara mandiri di halaman sendiri ataupun bekerjasama dengan TPS 3R pada tingkat Desa Adat atau Desa/Kelurahan.

Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber telah menegaskan bahwa pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara mandiri ataupun bekerjasama dengan TPS 3R, akan tetapi pada kenyataannya mayoritas masyarakat tidak melakukan pemilahan/pengelompokan sampah dan hanya bertumpu pada pola *end-of-pipe*. Pola *end-of-pipe* pada akhirnya akan menjadikan beban bagi TPS 3R terlebih jika sampah yang mudah terurai oleh alam tidak dipisahkan dengan cepat mengalami pembusukan dan mencemari lingkungan. Efek lainnya pada pola *end-of-pipe* adalah rusaknya daya jual sampah yang seharusnya memiliki nilai ekonomis seperti sampah plastik, botol, besi dan lainnya yang tercampur dengan pembusukan sampah yang mudah terurai tersebut. Menyikapi kondisi bahwa pelaksanaan upacara keagamaan di Bali berkontribusi besar terhadap timbulan sampah di Bali maka dalam penelitian ini tertarik untuk mengkaji peranan Desa Adat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Penelitian sejenis sebelumnya pernah dilakukan oleh I Gusti Ayu Diah Yuniti dkk, dengan judul penelitian "Gerakan Bersih Sampah Berbasis Sumbernya Melalui Perarem Desa Adat"⁵, pada penelitian ini tidak secara khusus mengkaji mengenai peran Desa Adat secara utuh dalam pengelolaan sampah berbasis sumber tetapi penelitian ini mengulas dampak dari suatu pengabdian kepada masyarakat terhadap

---

⁴ Ibid

⁵ Yuniti, I. Gusti Ayu Diah, Luh Putu Kirana Pratiwi, and Putu Diah Aryastuti Sanjiwani. "Gerakan Bersih Sampah Berbasis Sumbernya Melalui Perarem Desa Adat." *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek* 5, no. 2 (2024): 164-171.

pengelolaan sampah pada suatu Banjar Adat di Bali yang didasari pada *awig-awig*⁶ dan *pararem*⁷ setempat. Penelitian sejenis lainnya juga pernah dilakukan oleh I Made Dicky Taruna Wijaya, Ida Ayu Putu Widiati dan I Wayan Arthanaya dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber"⁸, pada penelitian ini secara umum hanya mengkaji implementasi atas efektivitas pengaturan sampah berbasis sumber berdasarkan Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Kelurahan Padangtegal secara umum, tanpa mengkaji peran Desa Adat dalam upaya mewujudkan pengelolaan tersebut. Kedua penelitian tersebut diatas memiliki perbedaan mendasar pada penelitian ini. Penelitian ini dalam kajiannya memfokuskan menganalisis peran dan efektivitas desa adat di Bali dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah berbasis sumber.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan 2 rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah peran desa adat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Provinsi Bali?
2. Bagaimanakah efektivitas desa adat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Provinsi Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini untuk mengetahui peran desa adat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Provinsi Bali dan untuk mengetahui efektivitas desa adat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Provinsi Bali

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian sosio-legal. Metode penelitian sosio-legal dipilih karena dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan dengan studi normatif melalui analisis terhadap keberlakuan norma-norma hukum sesuai hirarkie PPU tetapi juga menganalisis keputusan-keputusan Majelis Desa Adat di Provinsi Bali (selanjutnya disebut MDA Provinsi Bali) sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan untuk menemukan, merumuskan serta menetapkan tafsir penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat di Bali. Penelitian ini juga menganalisis realitas keberlakuan hukum di masyarakat. Aristo Pangaribuan mengemukakan bahwa perspektif sosio-legal menghubungkan keberlakuan norma hukum dengan dunia nyata atau empirikal.⁹ Jenis pendekatan yang untuk menganalisis penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji PPU dan hukum adat yang relevant terhadap permasalahan pengelolaan sampah berbasis sumber. Penelitian ini juga menggunakan

---

⁶ *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh *Desa Adat* dan/atau *Banjar Adat* yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.

⁷ *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.

⁸ Wijaya, I. Made Dicky Taruna, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Wayan Arthanaya. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 146-150.

⁹ Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra. "Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2023): 351-383.

pendekatan analitis untuk menelaah pengertian, asas, kaidah dan konsep-konsep yang relevan terhadap permasalahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Di Provinsi Bali

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu global yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam upaya pemenuhan target tersebut diperlukan adanya kolaborasi seluruh element pemerintah untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Desa adat merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan di Bali. Eksistensi desa adat di Bali diakui berdasarkan pada Perda Desa Adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali tidak hanya berfungsi sebagai pranata adat yang mengatur pelaksanaan tradisi dan kegiatan keagamaan masyarakat hindu bali. Mengacu pada ketentuan Pasal 22 huruf o Perda Desa Adat di Bali, desa adat dapat bertugas untuk melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam persepektif kewenangan pemerintahan, persampahan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada kepada daerah merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah.¹⁰ Mengacu pada ketentuan UU Pengelolaan Sampah tidak mengatur secara khusus mekanisme pengaturan penanganan sampah berbasis pada sumber, akan tetapi pada ketentuan Pasal 22 diatur mengenai mekanisme penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan. Lebih lanjut, dalam UU Pengelolaan Sampah kewenangan penanganan sampah diatur melalui peraturan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Pengaturan turunan pengelolaan sampah di Bali diatur melalui Perda Pengelolaan Sampah, namun dalam Perda tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai peran desa adat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Akan tetapi, melalui ketentuan Pasal 33 Perda Pengelolaan Sampah memberikan legitimasi kepada Desa Adat yang dalam hal ini masih disebut dengan Desa Pakraman untuk dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah, adapun peran serta yang dimaksud sebagai berikut;

- a. "pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
- c. melaksanakan pengelolaan sampah diwilayahnya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak lain;"

Dalam upaya penguatan peran Desa Adat dalam pengelolaan sampah, melalui Perda Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa Gubernur dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada Desa Adat.

---

¹⁰ Hsb, Ali Marwan. "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." (2018). h.7

Kewenangan yang diberikan oleh Perda Pengelolaan sampah tersebut masih terlalu abstrak bagi Desa Adat dalam melaksanakan perannya untuk melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber. Dalam upaya penegasan tersebut, melalui Pasal 29 Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber desa adat diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan sampah secara swakelola. Adapun upaya yang dapat dilakukan desa adat untuk melakukan pengelolaan sampah secara swakelola berdasarkan Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ditentukan sebagai berikut;

- a. “menyusun Awig-Awig/Pararem Desa Adat dalam menumbuhkan Budaya Hidup Bersih di wewidangan Desa Adat;
- b. melaksanakan ketentuan Awig-Awig/Pararem Desa Adat secara konsisten; dan
- c. menerapkan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan Awig-Awig/Pararem Desa Adat.”

Dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan, desa adat dapat bersinergi dengan Desa Dinas/Kelurahan ataupun membentuk badan/lembaga pelayanan pengelolaan sampah ditingkat desa adat secara mandiri. Selain itu, desa adat juga dapat bekerjasama dengan berbagai pihak yang dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang optimal selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk sinergitas desa adat dalam pengelolaan sampah diatur dalam ketentuan Pasal 30 Pergub Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap pengelolaan Sampah;
- b. membangun TPS 3R untuk mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
- c. mengangkut Sampah dari sumbernya ke TPS 3R, FPS/Bank Sampah, dan/atau TPA.

Pengelolaan sampah berbasis sumber yang dikelola oleh Desa Adat sejatinya tidak hanya upaya memenuhi amanat konstitusi untuk menjamin lingkungan hidup yang sehat dan baik tetapi juga dapat dikembangkan sebagai pendapatan yang sah bagi Desa Adat.

Berdasarkan Perda Desa Adat di Bali, desa adat diberikan ruang untuk melaksanakan kegiatan usaha pada bidang ekonomi, pelayanan dan/atau jasa yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang disebut dengan *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*. Pengelolaan sampah berbasis sumber dapat dilakukan oleh Desa Adat yang terkelola melalui *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* untuk dapat memberikan manfaat materil dan inmateril bagi masyarakat desa adat.

3.2 Efektivitas Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Provinsi Bali

Hukum merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita kenegaraan diantaranya untuk memberikan lingkungan hidup yang sehat dan baik bagi masyarakatnya. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut negara memberikan otonomi kepada daerah untuk melaksanakan pengelolaan persampahan. Mengacu pada hukum positif maka desa adat di Bali memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber, namun efektivitas terhadap implementasi kewenangan yang diberikan perlu dikaji lebih lanjut. Efektivitas hukum umumnya dipahami sebagai cerminan atas kepatuhan dan kesadaran hukum dimasyarakat. Efektivitas hukum pada masyarakat dapat dijadikan sebagai indikator penilaian

apakah terjadi kesenjangan *law in book* dengan *law in society or action*.¹¹ Dikutip melalui Lalu M. Alwi Ahadi, menurut Soerjono Soekanto, sejatinya terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dimasyarakat yaitu¹²; 1. Faktor peraturan perundang-undangan; 2. Faktor penegak hukum; 3. Faktor sarana dan prasarana; 4. Faktor lingkungan masyarakat; 5. Faktor kebudayaan di masyarakat.

Faktor pengaturan perundang-undangan, jika mengacu pada berbagai regulasi yang telah disebutkan sebelumnya, khususnya Pasal 29 Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber disebutkan bahwa desa adat dapat melakukan pengelolaan sampah dengan bersinergi dengan desa desa/kelurahan dan/atau membentuk lembaga pengelolaan sampah pada tingkat desa adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan jelas diketahui desa adat di Bali memiliki legitimasi untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber secara mandiri ataupun melalui bekerjasama. Desa adat berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perda Desa Adat di Bali disebutkan bahwa "Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *kasukretan* Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala* dan *niskala*." Tugas desa adat dalam mewujudkan *kasukretan sakala* dan *niskala* tersebut meliputi beberapa aspek yang ditentukan berdasarkan Pasal 22 Perda Desa Adat di Bali salah satunya untuk melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan berbagai ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan jelas diketahui bahwa desa adat diberikan tanggungjawab dan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber diwilayahnya. MDA Provinsi bali sebagai *pasikian* yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan pengayoman dan pembinaan kepada desa adat di Bali kemudian menetapkan Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor 08/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat (selanjutnya disebut Pesamuhan Agung Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat).

Desa Adat di Bali dalam ketentuan Pesamuhan Agung Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat, disebutkan bahwa jika Desa Adat tidak dapat membangun tempat pengolahan sampah/TPS 3R secara mandiri, maka peran yang dapat dilaksanakan oleh Desa Adat adalah: "a) Menyusun *Pararem* Desa Adat dalam pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat; b) Melaksanakan ketentuan *Pararem* Desa Adat secara konsisten; dan c) Menerapkan sanksi kepada Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu terhadap pelanggaran ketentuan *Pararem* Desa Adat." *Pararem* pada hakekatnya merupakan aturan yang dibentuk oleh desa adat berdasarkan keputusan bersama oleh masyarakat adat. *Pararem* sebagai suatu bentuk aturan hukum pada tingkat Desa Adat yang berdasarkan ketentuan Pasal 38 Pergub Pengelolaan Sampah di Bali dapat memberikan sanksi kepada *krama adat*, *krama tamiu* dan *tamiu*. Keberadaan sanksi pada hakekatnya bertujuan untuk memastikan kaidah ataupun norma hukum yang tertuang dalam suatu aturan hukum dapat dicapai. Ahmad Mathar, menyatakan bahwa "Tugas sanksi adalah alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum (sebagai alat represif)."¹³

---

¹¹ Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110-127.

¹² Ibid, h.117

¹³ Mathar, Ahmad. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. II (2023).

Penerapan sanksi pada *pararem* diatur dalam Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat, *pararem* dapat menerapkan 3 jenis sanksi yaitu; "(1) Pelanggaran ringan dapat berupa teguran lisan atau tertulis dan/atau danda *panyangaskara*, (2) Pelanggaran sedang dapat berupa *arta danda mwah panikel lan panikel ngulung*; (3) Pelanggaran berat dapat berupa *karampag* atau *manut Awig-Awig* Desa Adat." Dalam prakteknya efektifitas penegakan hukum dan penerapan sanksi atas pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh desa adat sepenuhnya mengacu kesepakatan masyarakat desa adat yang ditetapkan dalam *pararem*.

Lebih lanjut, dalam upaya untuk mewujudkan Bali bebas sampah, pemerintah menetapkan Surat Edaran Gubernur Bali No. 09 Tahun 2025 Tentang Gerakan Bali Bersih Sampah (SE Gerakan Bali Bersih Sampah) sebagai naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang sesuatu hal tertentu yang berlaku internal organisasi.¹⁴

SE Gerakan Bali Bebas Sampah Plastik mewajibkan Desa/Kelurahan dan Desa Adat untuk menuntaskan pengelolaan sampah berbasis sumber. Bendesa Adat sebagai pucuk pimpinan pada tingkat desa adat diwajibkan membuat *pararem* serta membuat unit pengelola sampah. Surat edaran merupakan naskah dinas yang berupa kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang berisikan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Artinya materi muatan surat edaran berisi pemberitahuan yang sifatnya penting dan mendesak.¹⁵ Hal menarik dalam SE Gerakan Bali Bersih Sampah pemerintah menetapkan sanksi kepada Desa/Kelurahan dan/atau Desa adat yang tidak melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber yang berupa:

- a. "Penundaan bantuan keuangan;
- b. Penundaan pencairan insentif Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Penundaan pencairan bantuan keuangan kepada Desa Adat; dan
- d. Tidak mendapat bantuan/fasilitas program yang bersifat khusus"

Materi muatan dari suatu surat edaran hanya bersifat pemberitahuan atau petunjuk yteknis yang berlaku internal organisasi, bukan memuat meteri muatan yang bersifat mengatur umum dan memuat sanksi.¹⁶

Keberadaan sanksi pada hakekatnya sebagai alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang.¹⁷ Sanksi juga disebut sebagai alat represif akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan yang diatur. Akan tetapi, perdebatan atas kekuatan mengikat Surat Edaran masih menjadi perdebatan publik, keberadaan Surat Edaran merupakan bagian dari peraturan kebijakan yang memuat pemberitahuan atau informasi yang bersifat petunjuk dalam melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga materi muatan Surat Edaran tidak sama dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka surat edaran pada hakikatnya bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan. Jika dilakukan

¹⁴ Ely, M. W., Pietersz, J. J., & Bakarbesy, A. D. (2023). Sanksi Administrasi Dalam Surat Edaran. *LUTUR Law Journal*, 4(2), 107-112.

¹⁵ Yusdheaputra, W. (2023). Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 6(1).

¹⁶ Pattinasarany, Yohanes. "Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi." *Jurnal Saniri* 3, no. 1 (2022): 27-36.

¹⁷ Mathar, Ahmad. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. II (2023). h.46

¹⁸ Loc.cit, Pattinasarany, Yohanes. (33)

analisis terhadap surat edaran, pada penamaannya saja sudah bukan merupakan peraturan melainkan menggunakan surat edaran, yang mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa surat edaran termasuk pada peraturan *kebijakan (beleidsregels atau policy rules)*.¹⁹ Akan tetapi materi muatan surat edaran yang bersifat memaksa dan mengatur dalam mempengaruhi publik berpotensi menciptakan efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber pada Desa Adat di Bali.

Faktor sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah berbasis sumber oleh Desa Adat dapat dilakukan dengan beberapa opsi pelaksanaan. Desa adat diberikan ruang untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara swakelola atau dilakukan dengan membangun TPS3R yang mudah terurai oleh alam. Akan tetapi, kondisi ini tentu akan sangat berbeda disetiap desa adat karena tidak semua desa adat memiliki wilayah dan kemampuan yang memadai untuk membangun TPS3R. Dalam pengelolaan persampahan tentu akan menimbulkan biaya pendukung atas sarana dan prasana yang digunakan, untuk menyikapi kondisi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 33 Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber desa adat dapat mengenakan biaya atas pelayanan persampahan yang meliputi; "a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari Sumber Sampah ke Bank Sampah, TPS 3R dan TPA; dan/atau b. biaya pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam di TPS 3R." Besaran pembiayaan atas pelayanan sampah tersebut ditentukan sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat yang ditetapkan dalam *awig-awig* ataupun *pararem* desa adat.

Faktor lingkungan masyarakat dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan dimana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan. Efektivitas hukum dengan substansi hukum yang sama akan berbeda hasil penerapannya tergantung dari kesadaran dan penerimaan masyarakat untuk mematuhi. Dalam berbagai studi dikemukakan bahwa faktor lingkungan masyarakat erat kaitannya dengan faktor budaya dalam menunjang efektivitas hukum. Faktor budaya dalam keberlakuan efektivitas hukum meliputi hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰ Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum tentang perbuatan yang dianggap baik untuk dipatuhi atau perbuatan yang dianggap buruk untuk dihindari. Kebudayaan merupakan faktor yang melandari terbentuknya hukum adat dan hukum negara yang dilegislati dalam bentuk PPU. Pada kenyataannya, keberadaan hukum adat di Bali berjalan sinergis dengan hukum negara. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Berkaitan dengan faktor-faktor efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto tersebut, efektivitas desa adat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Provinsi Bali tidak dapat ukur secara generalisasi. Saat ini di Provinsi Bali terdapat 1.500 Desa Adat, faktor produk hukum dan mekanisme penegakan hukum antara desa adat satu dan lainnya tentu berbeda. Selain itu potensi desa adat dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah berbasis sumber tentu sangat beragam tidak hanya disebabkan oleh faktor sarana dan prasarana, namun juga kecakapan sumber daya manusia dalam pengelolaan tersebut. Penerimaan masyarakat atas suatu pengaturan hukum turut

---

¹⁹ Loc.cit, Yusdheaputra, W. (203)

²⁰ Ariyanti, Vivi. "Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia." *Jurnal yuridis* 6, no. 2 (2019): 33-54.

menunjang efektivitas penegakan hukum yang dapat bersumber dari kebudayaan dan kesadaran hukum masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian desa adat di Bali diberikan tugas dan tanggungjawab oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk turut peran dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Provinsi Bali. Berbagai regulasi telah disusun untuk memberikan legitimasi bagi desa adat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. MDA Provinsi Bali sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah telah menetapkan pedoman bagi Desa Adat di Bali dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Dalam pelaksanaannya, efektivitas desa adat di Bali dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber tidak dapat digeneralisasi mengingat saat ini di Bali terdapat 1.500 desa adat dengan keberagaman potensi, sumber daya dan budaya hukum masyarakat terhadap kepatuhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abidin, Indra Sutrisno, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Observasi penanganan dan pengurangan sampah di Universitas Singaperbangsa Karawang." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 872-882.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110-127.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia." *Jurnal yuridis* 6, no. 2 (2019): 33-54.
- Ely, M. W., Pietersz, J. J., & Bakarbesy, A. D. (2023). Sanksi Administrasi Dalam Surat Edaran. *LUTUR Law Journal*, 4(2), 107-112.
- Hsb, Ali Marwan. "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." (2018). h.7
- Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra. "Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2023): 351-383.
- Pattinasarany, Yohanes. "Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi." *Jurnal Saniri* 3, no. 1 (2022): 27-36. h.32
- Wijaya, I. M. W., & Putra, I. K. A. (2021). Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di Pulau Bali. *Jurnal Ecocentrism*, 1(1), 1-8.
- Wijaya, I. Made Dicky Taruna, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Wayan Arthanaya. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 146-150.
- Yuniti, I. Gusti Ayu Diah, Luh Putu Kirana Pratiwi, and Putu Diah Aryastuti Sanjiwani. "Gerakan Bersih Sampah Berbasis Sumbernya Melalui Perarem Desa Adat." *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek* 5, no. 2 (2024): 164-171.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaaan Sampah

Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
Peraturan Gubernur No.47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
Surat Edaran Gubernur Bali No. 09 Tahun 2025 Tentang Gerakan Bali Bersih Sampah

Pedoman Hukum Adat Bali

Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat
Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor 08/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat

Internet

Data Pengelolaan Sampah Provinsi Bali,
URL:<https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/data-pengelolaan-sampah-per-kabupatenkota-di-provinsi-bali?year=2021> , dikutip pada 30 Desember 2023, Pukul 22.27 WITA